KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR akan Bangun Alun-alun: Kawasan Parlemen di Senayan Hendak Dijadikan Ikon Nasional
Tanggal : Kamis, 21 Mei 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Akan Bangun Alun-alun

Kawasan Parlemen di Senayan Hendak Dijadikan Ikon Nasional

JAKARTA, KOMPAS – Wacana pengembangan Kompleks Parlemen di Senayan terus ditindaklanjuti DPR. Hingga akhir masa jabatan pada 2019, DPR merencanakan tujuh tahap pengembangan Kompleks Legislatif. Salah satu gagasan yang akan diwujudkan dalam waktu dekat adalah pembangunan alun-alun khusus untuk area demonstrasi publik.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5), mengatakan, tujuh tahap pengembangan itu sudah diatur oleh Tim Implementasi Reformasi DPR yang dibentuk pada 9 Februari 2015. Fahri ditunjuk sebagai ketua tim tersebut, yang akan mulai bekerja intensif sejak masa sidang keempat ini.

"Ide reformasi ini diperlukan sebagai bentuk penguatan kelembagaan parlemen. Kami harus meyakinkan publik bahwa demokrasi adalah perjuangan yang berat, pilar-pilarnya harus dijaga. DPR perlu mengembangkan sistem-sistem pendukungnya. Tidak usah khawatir, pembangunan Kompleks Parlemen ini akan dilakukan setransparan mungkin," kata Fahri.

Fasilitasi publik

Pembangunan alun-alun demokrasi untuk memfasilitasi publik yang ingin melakukan demonstrasi akan dilakukan pada tahap pertama. Alun-alun itu direncanakan dibangun di kawasan terbuka Kompleks Parlemen.

"Selama ini, demonstrasi selalu menghasilkan kemacetan. Hal itu karena DPR tidak menyediakan tempat yang cukup bagi partisipasi publik. Fasilitas ini akan membantu mengatasi masalah itu, menciptakan tempat yang aman dan damai untuk penyampaian aspirasi publik," kata Fahri.

Selanjutnya, tahap kedua adalah pembangunan museum dan perpustakaan baru DPR. Untuk pembangunan museum, DPR akan memakai gedung Nusantara atau yang dikenal dengan sebutan Gedung Kura-kura.

Tahap ketiga, mencakup pembangunan akses publik ke gedung DPR untuk memudahkan publik mengunjungi fasilitas-fasilitas yang ada di Kompleks Parlemen. Tahap keempat adalah membangun pusat pengunjung parlemen dalam bentuk area tertutup dengan restoran, toko cenderamata, dan lain sebagainya.

Tahap kelima adalah pembangunan ruangan pusat pengkajian legislasi dan rancangan undang-undang untuk memenuhi fungsi legislasi DPR. Untuk fasilitas tersebut, ujar Fahri, Presiden Joko Widodo sudah memberikan restu dan mengeluarkan Keputusan Presiden.

Tahap keenam, pembangunan ruang kerja untuk anggota DPR dan tenaga ahli yang ke depan akan memiliki standardisasi ruangan yang sama. Tahap terakhir adalah mengintegrasikan kawasan legislatif di sekitar Senayan untuk menjadi satu kawasan parlemen. "Kawasan itu akan dijadikan ikon nasional, sebagai destinasi kunjungan publik, dan pusat pengetahuan bangsa," kata Fahri.

Terkait anggaran, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono mengatakan, Sekretariat Jenderal DPR sedang menyusun perencanaan detailnya.

"Yang pasti, untuk mewujudkan rencana ini, akan kami masukkan juga dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Lalu, secara bertahap, pada tahun-tahun anggaran berikutnya," kata Roem.

Menurut Roem, pembangunan alun-alun demokrasi ditargetkan rampung pada 2017.

Bukan solusi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai rencana DPR mengembangkan kawasan parlemen ini sebenarnya tidak menjawab pokok permasalahan. Untuk penguatan lembaga parlemen, DPR tidak perlu sampai membangun gedung dan fasilitas baru.

"Penguatan dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas manusia yang bekerja di dalamnya. Perbaiki kinerja. Tak perlu sampai menghabiskan anggaran untuk bangun fasilitas baru. Rekomendasi tim implementasi reformasi DPR ini aneh," katanya.

Menurut Lucius, untuk memulai reformasi di parlemen, DPR dapat memulai dengan melakukan praktik transparansi di bidang anggaran. (AGE)